



Judul : Pemda, Sediakan Karpét Merah
Tanggal : Minggu, 21 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Investasi Tak Lagi Jawa Sentris **Pemda, Sediakan Karpét Merah**

ANGGOTA Komisi VI DPR Syamsul Luthfi mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) lebih ramah terhadap investasi. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perizinan yang berbelit-belit kini bisa dipangkas.

Syamsul menuturkan, di era Pemerintahan Jokowi, investasi benar-benar diperhatikan. Hasilnya, sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, investasi terus menggeliat tumbuh dan menjanjikan. Banyak investor bahkan lebih tertarik menanamkan modalnya di luar Jawa.

"Jadi, kalau kita lihat investasi saat ini tidak Jawa sentris lagi, tapi sudah Indonesia sentris. Bahkan porsinya lebih banyak di luar Jawa. Tentu ini sangat kita syukuri. Ini menandakan percepatan untuk pemerataan perekonomian membaik dari tahun ke tahun," kata Syamsul, kemarin.

Politisi NasDem ini bilang, ada progres yang sangat menjanjikan dalam investasi. Ini semua bisa terwujud berkat koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Dampaknya pun bahkan sudah sangat terasa.

Dia lalu menyoroti hadirnya sejumlah perusahaan-perusahaan raksasa Korea Selatan di Indonesia. Padahal dulunya, mereka tidak tertarik berinvestasi di negara kita. Perusahaan Korea itu lebih memilih negara-negara tetangga untuk berinvestasi dan melebarkan sayapnya.

"Tapi kini mereka sudah

mulai melirik negara kita, ini semua terjadi karena kesungguhan dari pemerintah," ujar Syamsul.

Syamsul mengatakan, masalah perizinan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu kendala bagi investor dalam berinvestasi. Namun semua kendala dan hambatan tersebut semua dipangkas melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat dan Pemda menjaga iklim investasi yang sudah baik ini.

"Sebab investasi akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Lapangan kerja yang banyak akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat," ujar politisi daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini.

Dia pun berharap, peluang investasi ini benar-benar disambut dan dimanfaatkan dengan maksimal. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berpangku tangan.

"Seluruh provinsi, kabupaten/kota harus menjadi daerah yang ramah terhadap investasi, harus memberikan karpét merah kepada siapa pun yang berinvestasi, betul-betul dijamu, diperlakukan dengan baik," wantinya.

Sementara, anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mendorong pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya saing tinggi sebagai upaya memperkuat struktur industri nasional.

"IKM yang kuat dan berdaya saing tinggi tentu dapat memperkuat struktur industri nasional," kata Mukhtarudin. ■ KAL